

Book Review

Kerjasama ASEAN dalam Upaya Nasional Menuju Peran ASEAN Untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata

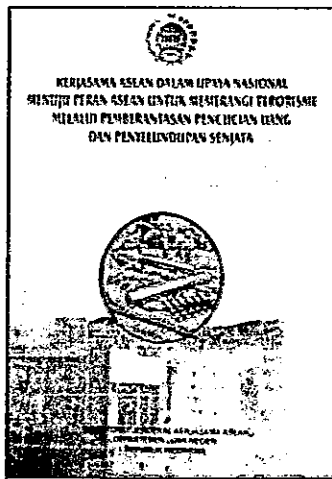
Presensi/Reviewer : Fika Hakim.,SH.,LL.M

Tebal Buku : 158 halaman

Bahasa : Indonesia

Ukuran : 15,2 x 22,5 cm

Penerbit : Direktorat Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia



Stabilitas dan keamanan di kawasan ASEAN merupakan tujuan utama yang termuat dalam Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) yang ditandatangani di awal terbentuknya ASEAN, 8 Agustus 1967. salah satu isu yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan ASEAN adalah Terorisme.

Tindak kejahatan terorisme banyak disinyalir pendanaannya dilakukan melalui penyelundupan senjata (*arms smuggling*) dan pencucian uang (*money laundering*). Untuk menangani tindak kejahatan tersebut dibutuhkan kerjasama lintas batas Negara.

ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di wilayah Asia Tenggara, menyadari bahwa kejahatan lintas batas Negara merupakan kejahatan yang sangat serius mengingat dampaknya yang destruktif terhadap aspek kehidupan manusia. Disamping itu, serangan Terorisme berdampak besar dengan menurunnya sektor pariwisata, perekonomian serta investasi asing. Penurunan ini disebabkan karena kepercayaan luar negeri terhadap kawasan ASEAN menurun secara drastis.

Buku yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, yang berjudul Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Nasional Menuju Peran ASEAN Untuk Memerangi

Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata, ini mengulas mengenai tiga jenis kejahatan lintas negara yang saling berkaitan yaitu terorisme, penyelundupan senjata dan pencucian uang. Pembahasan akan difokuskan kepada pertanyaan apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah dapat secara simultan mendukung upaya yang dilakukan di tingkat ASEAN.

Bab I dalam buku ini meninjau secara ringkas mengenai definisi, konsep-konsep yang digunakan, serta metode penelitian.

Bab II mengupas secara menyeluruh mengenai upaya-upaya ASEAN dalam menangani kerjasama lintas Negara sejak ditandatanganinya *Declaration of ASEAN Concord* pada 24 Februari 1976, kesepakatan-kesepakatan di bidang sosial untuk meningkatkan kerjasama dalam menghindari dan memberantas penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba.

Kesepakatan yang ditandatangani tersebut bervariasi mulai dari tingkat kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN, kesepakatan di tingkat Menteri ASEAN, kesepakatan para Menteri Ekonomi ASEAN dengan Komisi Dagang Uni Eropa (*EU Trade Commissioner*), Kesepakatan pertemuan khusus para menteri ASEAN mengenai terorisme (*Special ASEAN Ministerial Meeting on Terrorism*), Kesepakatan dari konferensi para kepala Polisi ASEAN (*ASEAN chiefs of Police Conference/ASEANPOL*), Kesepakatan dari pertemuan para Menteri Hukum ASEAN, Kesepakatan dari forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum*), kesepakatan tingkat pejabat tinggi, kesepakatan pertemuan khusus para pejabat tinggi mengenai Terorisme (*Special SOM on Terrorism*), serta kesepakatan dari pertemuan para Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepada Divisi Masalah Konsuler Kementerian Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Directors-General of Immigration & Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministeries of Foreign Affairs/ DGICM*).

Bab III dalam buku ini membahas mengenai isu dan permasalahan mengenai penyelundupan senjata di Indonesia, upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Dalam menangani masalah ini Pemerintah Indonesia telah memberdayakan instansi yang menangani masalah keamanan, TNI dan Polri, dan juga Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mengawasi lalu lintas barang dan manusia yang keluar masuk wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, aparat pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kendala seperti : adanya keterbatasan sarana atau

fasilitas yang dimiliki oleh Polri baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), masih adanya wilayah-wilayah di Indonesia yang berbatasan dengan Negara Thailand, Malaysia, Sabah, Mindanao, Myanmar, Kamboja dan Vietnam yang sarat dengan pergolakan senjata, adanya keterlibatan kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menjadi konsumen dalam perdagangan senjata ilegal, masih perlunya penegakan hukum secara lebih tegas, perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada di Negara lain khususnya di wilayah ASEAN sehingga tidak menghambat kerjasama regional maupun internasional dalam pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata.

Bab IV membahas mengenai isu dan permasalahan mengenai pencucian uang di Indonesia, upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Mengingat sifat kegiatan pencucian uang yang bersifat global dan dapat melampaui batas-batas yurisdiksi suatu Negara, maka diperlukan adanya kerjasama internasional antara Negara maju dengan Negara berkembang untuk memerangi kegiatan ini. Kerjasama internasional yang sudah terbentuk salah satunya adalah *The Financial Action Task Forces (FATF)*. Salah satu rekomendasi dari FATF yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah mengenai Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) no.3/23/PBI/2001 tanggal 31 December 2001.

Walaupun Indonesia bukan termasuk salah satu Negara yang tergabung dalam FATF, Indonesia menjadi salah satu Negara anggota *Asia-Pacific Group on Money Laundering (AGF)*.

Indonesia disinyalir merupakan salah satu Negara yang menjadi salah satu sumber sekaligus muara pencucian uang. Oleh karena itu, AGF mendukung sepenuhnya 40 rekomendasi dari FATF sebagai program aksi preventif praktek pencucian uang dan Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan. FATF telah melakukan review terhadap beberapa Negara termasuk Indonesia, dan dari hasil tersebut, pada tanggal 22 Juni 2001, Indonesia diputuskan untuk masuk ke dalam *Non Cooperative Countries and Territories (NNCTs)*. Sebab ada butir-butir dalam rekomendasi FATF belum dapat diterapkan sepenuhnya oleh Indonesia.

Adapun aspek-aspek yang dapat menyuburkan kekuatan-kegiatan pencucian uang di Indonesia adalah : korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya kesadaran masyarakat umum tentang tindak pidana pencucian uang.

Keputusan FATF akan berdampak negatif bagi hubungan-hubungan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya dengan lembaga-lembaga keuangan di luar negeri khususnya di Negara maju bila tidak dilengkapi dengan langkah-langkah perbaikan.

Bab V memberikan kesimpulan secara menyeluruh atas penelitian ini dan memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya memerangi terorisme baik dalam negeri maupun di tingkat ASEAN.

Rekomendasi yang diberikan dalam buku diantaranya adalah perlunya pembahasan secara intensif mengenai aspek kejahatan lintas Negara, meningkatkan upaya intelijen dalam menghadapi kejahatan lintas Negara sampai tingkat operasional, meningkatkan upaya kerjasama konkrit dalam bidang imigrasi dan pabean serta melakukan penegakan hukum secara lebih tegas, meminta kalangan perbankan untuk lebih mengawasi asal-usul sumbernya, meminta Pemerintah untuk melakukan introspeksi dan mengoptimalkan beberapa penanggulangan, meningkatkan langkah-langkah pencegahan untuk menangani masalah terorisme, yaitu dengan menyelidiki, memeriksa, menunda, memeriksa ekspor/impor, memeriksa dokumen, dan memeriksa badan usaha orang yang bersangkutan, serta untuk lebih menanggulangi berkembangnya penyelundupan senjata ke Indonesia perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat pantai, kualitas SDM aparat, peningkatan peralatan operasi yang lebih canggih, penggalangan dana pendukung, dan peningkatan kerjasama serta koordinasi antar departemen / instansi pemerintah dan swasta terkait.

Buku yang terdiri dari 158 halaman ini juga dilengkapi dengan lima belas lampiran pada lampiran akhirnya. Lampiran-lampiran tersebut diantaranya adalah *ASEAN Declaration on Transnational Crime (1997)*, *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (1999)*, *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism (2001)*, Keputusan Menko Polkam tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (2002), UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)", UU No.15 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, *Co-Chairs Statement on Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (2002)*.